

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Skripsi ini akan mengeksplorasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama dan Presiden Donald Trump tentang bahaya terorisme ISIS. Kemudian, khususnya, kita akan melihat kontras antara persepsi Presiden Barack Obama dan Presiden Donald Trump tentang bahaya yang ditimbulkan oleh serangan teroris. Kontrasnya yang dirasakan sangat signifikan karena berdampak pada perbedaan kebijakan yang ada di antara kedua pemerintahan tersebut.

Dengan berakhirnya Perang Dingin muncul kekhawatiran baru yang memerlukan kerjasama internasional, yaitu terorisme. Ketika semua negara di seluruh dunia bekerja sama untuk memerangi terorisme di tingkat nasional, regional, dan internasional, kami menyebutnya koalisi global. Menyusul serangan teroris di markas militer Amerika Serikat, Pentagon, dan gedung World Trade Center pada 11 September 2001, oleh kelompok radikal Al-Qaeda, terorisme telah meningkat menjadi isu yang paling dominan dalam hubungan internasional dan dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan global. Berbagai belahan dunia terguncang, dan orang-orang di seluruh dunia menyuarakan keprihatinan mereka tentang terorisme. Aktivitas yang dilakukan Al-Qaeda tergolong aksi terorisme yang membahayakan tidak hanya keamanan global tetapi juga institusi demokrasi di seluruh dunia. Amerika Serikat menanggapi serangan oleh jaringan teroris Al-Qaida dengan mengeluarkan strategi "Perang Global Melawan Terorisme", yang diumumkan dalam pidato yang dibuat oleh Presiden Bush sehari setelah insiden itu terjadi.

Hal ini kemudian mendorong Amerika Serikat untuk menyerang Irak, yang berfungsi sebagai awal pembentukan ISIS. Perang dimulai pada tahun 2003, dan setelah penarikan

Amerika Serikat, itu melahirkan organisasi-organisasi ekstremis. Abu Mus'ab Az Zarqawi adalah sosok yang diajari untuk berjihad dan berjuang membangun organisasi ekstrem, Jamaah Tauhid wa-i Jihad (JTJ), yang merupakan cikal bakal Negara Islam Irak dan Syam (ISIS). .

Pada masa pemerintahan Abu Bakar Al-Baghdadi, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) menyatakan niatnya untuk bergabung dengan organisasi jihad pemberontak Suriah, Jabhat An-Nusra (JN), dan dengan demikian menjadi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Namun, JN kemudian menyatakan tidak bersedia bergabung dengan ISI karena hanya terlibat perang melawan pemerintahan Bashar Al-Assad di Suriah dan tidak tertarik bergabung dengan ISI. (Tambunan, 2014) .

Al – Qaeda kemudian mengikuti JN untuk memutuskan hubungan dengan ISIS karena menurut Al – Qaeda, ISIS telah memperburuk citra Islam karena ada berbagai macam terror yang telah dilakukannya seperti bom bunuh diri dan pembunuhan dan menjadikan rakyat Irak dan Suriah yang beragama muslim sebagai sasarannya (Tambunan, 2014).

Melihat banyaknya tindakan-tindakan teror yang dilancarkan oleh ISIS, dunia internasional secara kolektif mengecam tindakan-tindakan ISIS. Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki kepentingan yang besar di Timur Tengah, melihat tindakan ISIS dapat mengancam keberlangsungan kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah, maka Amerika Serikat pun tentu melakukan upaya-upaya untuk membendung aksi ISIS.

Keseriusan Amerika Serikat dalam mengajak dunia internasional untuk memerangi ISIS dapat dilihat dari upayanya membentuk koalisi bersama negara-negara lain untuk memerangi ISIS (Deutsche, 2014).

Melihat banyaknya aksi teror yang dilakukan ISIS di dunia internasional, semuanya mengutuk tindakan ISIS. Upaya Amerika Serikat untuk melancarkan perang internasional melawan ISIS mendapat respon positif dari dunia internasional, terlihat dari klaim Menteri Luar Negeri AS John Kerry bahwa 40 negara bersedia bergabung untuk melawan ISIS (Saputra, 2019).

Sejak pemerintahan George Bush, Amerika Serikat dan beberapa mantan presiden memang fokus kebijakan luar negerinya di Timur Tengah, karena Amerika Serikat membutuhkan Timur Tengah dengan cadangan minyak yang melimpah. Fokus dilanjutkan ke pemerintahan berikut, yaitu Barack Obama dan Donald Trump.

Barack Obama adalah Presiden Amerika Serikat yang dipromosikan oleh Partai Demokrat. Setelah Barack Obama jaga terorisme, terutama ISIS. Kemudian, Obama undang orang Amerika untuk bersatu, apapun ras, agama atau rasnya untuk melawan ISIS. Obama kemudian membentuk koalisi melawan ISIS secara internasional. Namun, kebijakan Obama banyak dikritik Republikan, karena dianggap sangat lemah terhadap ISIS.

Setelah Barack Obama menyelesaikan dua Periode, Presiden AS Donald Trump dari Partai Republik, kemudian menjabat sebagai ketua penerus Amerika Serikat. Selama masa pemerintahannya, Donald Trump kerap melancarkan serangan langsung ISIS dan bahkan membunuh banyak warga sipil. Kebijakan keras Donald Trump terhadap ISIS bahkan sempat menarik perhatian *Human Rights Watch* (Fadil, 2020).

Barack Obama menggunakan kebijakan *smart power* dalam menghadapi ancaman terorisme. Obama menyikapi negara-negara muslim dengan mengutamakan keberadaan kekuatan multinasional yang merupakan bagian dari *peace building* yaitu mengadopsi cara-cara damai melalui pembangunan daerah pasca konflik di Irak dan Afghanistan, serta melakukan dialog dan penyelesaian damai melalui forum internasional. Obama juga

mengadopsi kebijakan pengaturan agenda Irak dan kerja sama dengan negara / kawasan lain, salah satunya dengan Indonesia (Apyria, 2014). Sedangkan Donald Trump menggunakan kebijakan *hard power* dalam menghadapi ancaman terorisme. Donald Trump menganggap ISIS sebagai ancaman yang menghambat kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah.

Kekosongan kebijakan ini dapat dilihat dari perspektif ekonomi dan strategi militer, serta perspektif lainnya. Selama kampanye kepresidenannya, Barack Obama berjanji untuk mengakhiri konflik, dan dia menindaklanjuti komitmen itu setelah menjabat dengan mengeluarkan semua pasukannya dari Irak pada 2010. (Deborah, 2017). Menurut George R. Altman, sejumlah besar uang dihabiskan untuk tindakan militer di Irak dan Suriah selama perang antara kedua negara, dan Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi pada tahun 2008. Alwafi Ridho Subarkah (2018) menggambarkan formalisasi formal diformalkan diformalkan diformalkan diformalkan diformalkan diformalkan (Alwafi Ridho Subarkah, 2018). Oleh karena itu, Presiden Barack Obama mengusulkan proposal anggaran yang akan mengurangi pengeluaran pemerintah federal sebesar \$160 miliar. Akibat pelaksanaan program tersebut, pada awalnya mungkin memberikan berbagai keuntungan dan kerugian baik bagi Demokrat maupun Republik, tergantung pada situasinya. Demokrasi memilih opsi ini karena berpotensi menghemat uang sekaligus menurunkan kewajiban militer di Timur Tengah, yang keduanya merupakan isu kritis dalam suasana politik saat ini. Tindakan Presiden Barack Obama, menurut Partai Republik, akan melemahkan kekuatan Amerika sementara juga menawarkan kesempatan bagi teroris untuk melanjutkan kegiatan mereka di Amerika Serikat. Menurut tujuan kebijakan luar negeri Presiden Barack Obama, kekuatan global Amerika Serikat tidak akan segera berkurang. Untuk mempertahankan pengaruhnya di Timur Tengah, Amerika Serikat percaya bahwa mereka perlu membentuk koalisi internasional untuk memerangi Negara Islam, yang akan membutuhkan partisipasi

negara lain (ISIS). Presiden Barack Obama menggunakan drone sebagai bagian dari upaya militer untuk menurunkan pengeluaran militer di Amerika Serikat untuk mencapai tujuan ini. Altman (2017) mendefinisikan kata keterangan formal.

Sementara itu, Presiden Donald Trump telah melembagakan kebijakan untuk menggelontorkan uang dalam jumlah besar ke dalam dana militer karena Amerika Serikat menganggap ISIS sebagai ancaman bagi negara, dan akibatnya, Amerika Serikat harus memobilisasi dan terus memimpin kekuatan militernya untuk kebijakannya menjadi efektif dan efisien (Amadeo, 2019). Eka Yudha Saputra dari New York Times melaporkan bahwa Presiden Donald Trump telah mengirim lebih dari 200.000 tentara AS ke Suriah dan Irak untuk memerangi Negara Islam (IS). Kemarahan Presiden Donald Trump dalam pertempuran melawan Negara Islam Ini juga akan terlihat jika dan ketika Donald Trump memobilisasi pasukannya dan meluncurkan kampanye militer melawan Negara Islam. Sebagai bagian dari kampanye melawan Negara Islam Irak dan Suriah, Amerika Serikat sangat bergantung pada serangan udara serta tentara darat (ISIS). Donald Trump juga telah meluncurkan operasi militer melawan ISIS di Timur Tengah, menggunakan bom MOAB, yang merupakan senjata berteknologi paling canggih yang tersedia untuk Amerika Serikat pada saat pengumumannya, dengan efek yang menghancurkan. Presiden Donald Trump menggunakan kekuatan militer untuk melancarkan 40 operasi melawan ISIS dalam lima hari pada Maret 2017, lebih banyak dari jumlah total serangan yang diluncurkan oleh pemerintahan Obama dalam dua tahun sebelumnya jika digabungkan, menurut angka resmi. (Brechenmacher, 2017).

Dari penjelasan diatas terdapat penjelasan mengenai perbedaan kebijakan antara presiden Barrack Obama dan Donald Trump terhadap ancaman terorisme ISIS tersebut. Untuk itu, fakta ini menarik untuk dikaji di dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang penulis rumuskan adalah: Mengapa kebijakan Amerika Serikat era Presiden Barrack Obama dan Presiden Donald Trump berbeda dalam menyikapi ancaman terorisme ISIS?

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menjelaskan rumusan masalah yang ada, penulis menggunakan beberapa kerangka dasar teori dan konsep sebagai alat analisis untuk menganalisis objek pembahasan yang dapat mendukung penelitian ini. Dalam artikel ini, teori dan konsep yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Konsep Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan manifestasi fisik dari politik luar negeri suatu negara, dan dalam kebijakan ini kepentingan nasional merupakan kumpulan dari beragam kepentingan masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Kebijakan luar negeri resmi suatu negara dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Buku Miriam Budiarjo memiliki definisi politik luar negeri, yang berbunyi sebagai berikut: “Kebijakan adalah kumpulan individu atau organisasi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan, dan kebijakan tersebut memiliki wewenang untuk mewujudkan tujuan tersebut” (Miriam Budiarjo, 1995). Akibatnya, pelaksanaan kebijakan luar negeri memiliki tujuan tertentu dalam pikiran.

Di arena internasional, kebijakan luar negeri adalah kumpulan formula, nilai, sikap, orientasi, dan tujuan yang dirancang untuk melindungi, memastikan, dan meningkatkan kepentingan nasional dalam berbagai cara. Beberapa elemen baik dari

lingkungan eksternal maupun internal berdampak pada pilihan dan tindakan kebijakan luar negeri (Banyu Pewita, 2014).

Sumber daya alam, sebagai salah satu sumber investasi asing terpenting dalam pembentukan kebijakan luar negeri, menjadi pertimbangan. Karena ini adalah sumber internal, maka dapat disimpulkan bahwa pengalaman, keterampilan, dan kepribadian elit politik akan berdampak pada ide, perhitungan, dan tindakan politik luar negeri, termasuk pendapat mereka sendiri (Banyu Pewita, 2017). Opini publik yang dijadikan sebagai sumber utama perumusan kebijakan luar negeri merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan presiden sebagai pengambil keputusan terhadap isu-isu yang dibahas dalam artikel ini. Secara spesifik, salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan presiden sebagai pengambil keputusan adalah opini publik.

2. Teori Persepsi

Menjelaskan kebijakan luar negeri bisa dilakukan dengan berbagai cara. Akan tetapi didalam skripsi ini akan menggunakan tingkat analisis individu yakni persepsi seorang presiden Amerika Serikat. Persepsi ini penting karena akan mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara.

Teori persepsi adalah teori yang menjelaskan lahirnya keputusan berdasarkan persepsi individu sebagai pengambil keputusan, dan persepsi dibentuk oleh sistem kepercayaan. Teori ini menekankan pentingnya peran individu sebagai variabel untuk menjelaskan fenomena internasional. Menurut Mochtar Mas'oed persepsi atau citra yang dimiliki oleh individu bersifat dinamis, persepsi berperan dalam menentukan perilaku suatu negara, dan tanggapan atau keputusan didasarkan pada persepsi mereka terhadap situasi.

Pengambil keputusan dipengaruhi oleh berbagai proses psikologis yang memengaruhi persepsi dan proses psikologis lain yang memengaruhi kepribadiannya.

Persepsi terdiri dari tiga komponen: nilai, keyakinan, dan pengetahuan (atau informasi). Nilai-nilai seseorang adalah preferensi untuk klaim fakta tertentu bila dibandingkan dengan realitas lainnya. Keyakinan adalah keadaan pikiran di mana deskripsi kebenaran terbukti benar. Perolehan pengetahuan didasarkan pada fakta atau informasi yang dikumpulkan dari lingkungan. Ideologi, kepribadian, tingkat pendidikan dan lingkungan sekitar, posisi sosial, tindakan dan pengalaman sebelumnya (baik positif maupun negatif), kemungkinan kerugian dan penghargaan, serta keadaan emosi seseorang adalah semua elemen yang memengaruhi persepsi dan gambaran yang dihasilkan oleh pengambil keputusan. Kesan dan citra pengambil keputusan akan berdampak pada kebijakan yang diterapkan. Hal ini didasarkan pada citra aktor dan sistem nilai, dan keadaan dibentuk berdasarkan apa yang dia pahami tentang situasi tersebut.

Aspek	Barrack Obama	Donald Trump
Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi terkait Islam Agama yang toleran dan damai dari pengalaman hidup - Memiliki persepsi yang sama tentang interaksi dengan orang sekitar 	<ul style="list-style-type: none"> - Amerika Serikat menganggap ISIS sebagai ancaman yang menghambat kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah - Amerika Serikat ingin mendominasi kekuatan militernya di Timur Tengah agar kepentingannya dapat berjalan dengan baik

Fakta	<ul style="list-style-type: none"> - Terorisme adalah ancaman nyata - Munculnya terorisme internasional yang semakin radikal dan jaringan yang lebih luas 	<ul style="list-style-type: none"> - ISIS adalah ancaman nyata - Dunia internasional secara kolektif mengecam tindakan-tindakan terorisme ISIS
Nilai	Dibentuk oleh latar belakang sosial platform politik dan partai: Demokrat	Dibentuk oleh latar belakang sosial platform politik dan partai: Republik
Keputusan	Penggunaan <i>smart power</i> dalam menghadapi ancaman terorisme	Penggunaan <i>hard power</i> dalam menghadapi ancaman terorisme

Tabel 1.1 Perbandingan Sistem Keyakinan Barrack Obama dan Donald Trump

Dalam kerangka teoritis ini, kita dapat melihat bahwa terorisme telah menjadi isu nasional dan dunia dari sudut pandang Presiden Obama, tetapi terorisme tidak sama dengan ekstremisme Islam. Presiden Barack Obama dilahirkan dalam rumah tangga multikultural yang terbiasa menghadapi berbagai perbedaan budaya. Sebelum pindah ke Amerika Serikat, Obama tinggal di negara berpenduduk mayoritas Muslim, dan dia tidak merasa terintimidasi oleh Muslim di sekitarnya selama dia berada di sana. Sistem nilai Obama dipengaruhi oleh platform Partai Demokrat, yang menekankan kepedulian batin terhadap ekonomi dan demokrasi, serta sudut pandang ideologis liberal pada berbagai masalah. Karena teroris secara tradisional dikaitkan dengan Islam, meskipun terorisme adalah gerakan politik tanpa

hubungan agama, citra publik Obama mengubah opini publik tentang teroris, sehingga menghasilkan gambaran teroris yang lebih positif. Ini karena teroris secara tradisional terhubung dengan Islam, tetapi terorisme adalah gerakan politik tanpa koneksi agama. Yang lain, berbeda dengan Trump, kurang yakin dengan realitas bahaya teroris ISIS. Secara keseluruhan, sistem nilai Trump mewakili Partai Republik, yang menganut pandangan dunia konservatif yang ditandai dengan orientasi ke luar, kepedulian terhadap martabat, dan penerimaan supremasi militer dalam urusan internasional, di antara karakteristik lainnya. Hal ini berdampak pada cara pandang Trump terhadap terorisme yang ia bandingkan dengan Islam, dan kesan ini berdampak pada sikap Trump terhadap terorisme pada gilirannya.

Karena itu, Trump mengusulkan untuk memberikan sejumlah besar uang kepada militer dalam anggaran yang diusulkannya. Karena Amerika Serikat menganggap ISIS sebagai ancaman bagi kepentingannya di Timur Tengah, ia harus mengerahkan dan mempertahankan kendali atas kekuatan militernya agar kepentingannya di wilayah tersebut dapat dilayani secara efektif oleh Amerika Serikat. Sejumlah besar dana untuk militer telah diberikan oleh Trump dalam anggaran yang diusulkan sebagai konsekuensi dari ini.

Selain itu, Presiden Donald Trump memiliki opsi untuk menarik Amerika Serikat dari aliansi NATO yang berkekuatan 2.000 orang dan mencurahkan energinya untuk membantu koalisi anti-Suriah dalam perjuangannya melawan Negara Islam. Ketika datang untuk menggunakan aksi militer untuk mengalahkan Negara Islam, Trump memprioritaskannya di atas segalanya, meluncurkan 40 serangan udara selama lima hari di bulan Maret, yang lebih dari jumlah total serangan yang diluncurkan oleh Presiden Barack Obama dalam dua tahun sebelumnya digabungkan.

D. Hipotesa

Menyikapi bahaya terorisme ISIS, kebijakan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Barack Obama dan di bawah pemerintahan Donald Trump berbeda karena kedua presiden memiliki perspektif yang berbeda tentang masalah tersebut. Trump percaya bahwa terorisme adalah gerakan yang netral secara agama, tetapi Barack Obama percaya bahwa terorisme adalah sinonim untuk Islam di Timur Tengah dan percaya bahwa terorisme adalah gerakan agama tanpa identitas agama. Kesenjangan pemahaman tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa dalam hal terorisme, Barack Obama dan Donald Trump memiliki sistem nilai yang cukup berbeda, yang didasarkan pada pengalaman mereka sendiri dan masukan dari orang lain di lingkungan terdekat mereka. Sistem nilai ini kemudian mengarahkan mahasiswa dalam menentukan berbagai rumusan, arah, dan sikap terkait terorisme ISIS sebagai hasil dari pengalamannya.

E. Jangkauan Penelitian

Studi ini dibatasi pada dua periode masa kepresidenan Barack Obama (2009-2017), hingga Presiden Donald Trump menjabat dari tahun 2017 hingga 2020.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa Presiden Barack Obama dan Presiden Donald Trump mengadopsi kebijakan yang berbeda tentang terorisme.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, melalui penggunaan data sekunder yaitu penelitian kepustakaan berupa data tertulis, seperti buku, jurnal, surat kabar, dan diktat kuliah. Dan juga untuk data dalam bentuk elektronik, seperti e-book, e- jurnal dan

juga situs *website* untuk menganalisis perbedaan kebijakan Barack Obama dan Donald Trump terhadap ancaman terorisme ISIS.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari :

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II ada tiga pokok pembahasan yaitu :

1. Pembahasan tentang sebelum dan awal mula munculnya ISIS, dan juga tujuan dan cita – cita ISIS yang menyebabkan Amerika Serikat, terutama pada masa pemerintahan Barrack Obama dan Donald Trump untuk fokus terhadap politik luar negeri di Timur Tengah.
2. Pembahasan tentang perbedaan kebijakan luar negeri antara Barrack Obama dan Donald Trump dan juga bagaimana mereka merespon tentang adanya ancaman terorisme ISIS yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan Amerika Serikat karena salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan presiden sebagai pengambil keputusan adalah pandangan masyarakat yang dijadikan sebagai sumber utama perumusan kebijakan luar negeri tersebut.
3. Pembahasan tentang perbedaan persepsi yang memunculkan konsep latar belakang sosial dan politik yang berbeda dari Barrack Obama dan Donald Trump terhadap ancaman terorisme ISIS

Bab III menjadi penutup yang berisi kesimpulan penelitian yang diambil dari semua bab yang telah disusun.